

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 2 No. 2 Februari 2023

**PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs)
KE-8: STUDI KASUS DI JAWA TENGAH**

Risnandha Diksi Alfaris, Rinaldi Rustam, Syafri
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti

Email: risnandhadiksi@outlook.com, rinaldi.rustam@trisakti.ac.id, syafri@trisakti.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) ke-8 di wilayah Jawa Tengah dengan meneliti pengaruh determinan pertumbuhan ekonomi seperti kesempatan kerja, tingkat kemiskinan, investasi, indeks pembangunan manusia, dan pajak daerah. Metode Penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah metode penelitian kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan data time series dan cross-section. Data yang digunakan adalah data tahunan 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017 s.d 2021. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa seluruh variabel independen (kesempatan kerja, investasi PMDN, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan pajak daerah) berpengaruh signifikan namun variabel investasi PMDN dan pajak daerah tidak sesuai dengan teori atau berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini penting karena untuk mengetahui bagaimana pencapaian pembangunan daerah di Indonesia dengan sudut pandang ekonomi.

Kata Kunci: Jawa Tengah, Pertumbuhan ekonomi, Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Abstract

This research was conducted to look at the achievement of the 8th Sustainable Development Goals (SDGs) in the Central Java region by examining the influence of the determinants of economic growth such as employment opportunities, poverty rate, investment, human development index (HDI), and regional taxes. The research method used in this journal is a quantitative research method. The analysis technique used is panel data regression with time series and cross-section data. The data used is annual data for 35 regencies/cities in Central Java Province from 2017 to 2021. Based on the results of the study, it was found that all independent variables (employment opportunities, domestic investment, poverty rate, human development index (HDI), and regional taxes) have a significant effect but domestic investment and local taxes are not in accordance with the theory or have a negative effect on economic growth. This research is important because it is to find out how regional development is achieved in Indonesia from an economic perspective.

Keywords: Central Java, economic growth, Sustainable Development Goals (SDGs).

Pendahuluan

Salah satu tujuan SDGs yang perlu menjadi perhatian karena banyaknya permasalahan-permasalahan yang masih terjadi adalah tujuan ke-8 yaitu Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Permasalahan yang masih terjadi diantaranya adalah kekurangan kesempatan kerja yang layak secara terus menerus, investasi yang tidak memadai, kebijakan pemerintah yang kurang tepat, serta kemiskinan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi penting untuk diukur karena dapat menjadi tolak ukur peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat bagaimana kondisi perekonomian suatu daerah dalam suatu periode tertentu dapat diawasi dengan melihat kenaikan PDRB-nya. Menurut Sukirno (2004), tingkat pertumbuhan ekonomi dalam analisis makro yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara/daerah.

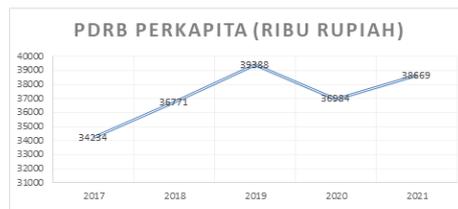
Selama kurun 2015-2019, Provinsi Jawa Tengah secara agregat mengalami pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata sebesar 4,51%. Pertumbuhan ekonomi minus pada tahun 2020 karena terjadinya Pandemi Covid-19. Nilai dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah selama periode tersebut secara rata-rata sudah berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, akan tetapi jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Jawa-Bali, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah masih berada di bawah. Hal tersebut menjadi temuan masalah yang menarik untuk dikaji mengingat sumber daya yang ada di Jawa Tengah cukup besar jika dibanding dengan provinsi lain seperti jumlah angkatan kerja, sumber daya alam, serta letak Jawa Tengah yang sangat strategis di Jawa-Bali.

Tabel 1 Pertumbuhan Ekonomi 7 Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2020
(dalam persen)

No	Prov.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jateng	4.68	4.49	4.52	4.59	4.71	-3,27
2	DIY	3.75	3.87	4.11	5.06	5.48	-3,67
3	Jatim	4.8	4.96	4.87	4.92	5.00	-2,84
4	Banten	3.24	3.14	3.67	3.75	3.36	-5,09
5	Bali	4.8	5.13	4.41	5.18	4.51	-10,22
6	DKI Jakarta	4.84	4.84	5.21	5.16	4.92	-3,16
7	Jabar	3.52	4.17	3.89	4.25	3.72	-3,65
8	Nasional	3.52	3.72	3.79	3.93	3.82	-3,15

Sumber: BPS, 2020

Peningkatan perekonomian masyarakat di Jawa tengah dapat dirasakan dan dibuktikan dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya. Perekonomian masyarakat yang meningkat dapat dilihat dari indikator kesejahteraan penduduk suatu daerah yakni PDRB per kapita (Pratiwi dan Sutrisna, 2014). Pertumbuhan PDRB dan PDRB perkapita yang tinggi menunjukkan bahwa banyak pekerjaan yang menyerap tenaga kerja serta tingginya tingkat pendapatan, selain itu pemungutan pajak lebih besar oleh negara memudahkan Pemerintah untuk mengeluarkan program dan kebijakan yang menysasar masyarakat (Wirawan dan Arka, 2015).



Sumber: BPS, 2021, data diolah

Gambar 1 PDRB Perkapita Provinsi Jawa Tengah

Pada Gambar 1, PDRB Perkapita tahun 2017 – 2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali di tahun 2020 dikarenakan Pandemi Covid-19. Peningkatan merupakan agregat pertumbuhan dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Pencapaian tersebut tidak lepas dari sumbangsih masyarakat dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Hal tersebut tercermin dari determinan-determinan PDRB yang hampir setiap tahun mengalami kenaikan juga.

Kesempatan kerja merupakan salah satu determinan dari pertumbuhan ekonomi dan juga memiliki dampak terhadap kemiskinan. Namun, mempunyai pekerjaan tidak menjamin kemampuan untuk keluar dari jurang kemiskinan. Ada juga faktor lain yang dapat menghambat seperti investasi yang kurang memadai, dan konsumsi yang rendah.

Kebijakan ekonomi dan perencanaan pembangunan yang disusun dengan menempatkan penciptaan kesempatan kerja sebagai dasar, akan menghasilkan peluang kerja yang lebar, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan. Lingkaran positif ini harus diterapkan karena dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan (Danawati, Bendesa, & Utama, 2016).

Menurut Kementerian PPN/Bappenas, pertumbuhan penduduk usia kerja mencapai 40 juta orang per tahun, dan untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu diciptakan kurang lebih 600 juta pekerjaan baru hingga tahun 2030. Pada Agustus 2021, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun sebesar 0,58% dari Agustus 2020, menjadi 6,49%. Meskipun turun, selama Pandemi Covid-19, terdapat 21,32 juta orang (10,32% penduduk usia kerja) terdampak Covid-19 dan menjadi pengangguran, Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19, penduduk bekerja dengan pengurangan jam kerja, dan sementara tidak bekerja.

Pengangguran atau permasalahan kesempatan kerja sulit dihindari oleh Negara. Selain itu, masalah tersebut juga riskan untuk menimbulkan masalah lainnya seperti masalah-masalah sosial dan masalah ekonomi. Masalah sosial dan ekonomi akan berpengaruh ke tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, berkurangnya angka pengangguran dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Dewi & Sutrisna, 2014).

Selain kesempatan kerja, investasi juga dapat menjadi faktor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan investasi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama 5 tahun menunjukkan bahwa investasi relatif mengalami kenaikan setiap tahunnya namun dari segi jumlah realisasi masih terbilang kecil. Pertumbuhan investasi ini perlu untuk diteliti signifikansi pengaruhnya terhadap pembangunan daerah dilihat dari sudut pandang ekonomi. (Rahmadi & Parmadi, 2019)

Kemiskinan menjadi salah satu biang masalah ekonomi yang sulit untuk diatasi. Masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhannya (Retno 2013) sehingga taraf hidup tidak bertumbuh, kegiatan konsumsi tidak terjadi di masyarakat, dan dapat memperlambat perekonomian. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk pengentasan kemiskinan. Melalui Inpres 4 Tahun 2022 tentang

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Presiden memberi arahan agar pengentasan kemiskinan dilakukan secara terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran melalui konvergensi program (TNP2K 2022). Penurunan kemiskinan perlu diteliti pengaruhnya salah satunya terhadap pertumbuhan ekonomi, untuk mengetahui bagaimana efektivitas kebijakan Pemerintah dan peran serta masyarakat dalam pengentasan kemiskinan.

Pembangunan manusia juga dapat menjadi indikator pertumbuhan pembangunan. Salah satu indikator terciptanya pembangunan untuk mendorong perekonomian adalah pembangunan manusia (Dewi & Sutrisna, 2014). Untuk mengukur pembangunan manusia dapat digunakan suatu indeks yaitu indeks pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit untuk mengukur pencapaian wilayah dalam pembangunan manusia, yang diantaranya adalah indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan (Mirza, 2012). Indeks harapan hidup diukur dengan angka harapan hidup saat lahir, indeks pendidikan didapat dari rata-rata lama sekolah, sedangkan indeks pendapatan merupakan indeks pengeluaran perkapita.

Instrumen lainnya yang berpengaruh signifikan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi adalah ketahanan wilayah atau kemandirian daerah. Salah satu faktor kemandirian daerah yang dapat diukur adalah kemandirian fiskal. Kemandirian fiskal merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah tanpa tergantung bantuan pembiayaan dari luar maupun dari pusat. Untuk itu, pajak daerah dapat digunakan sebagai instrumen pengukur pengaruh fiskal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Ginting & Hasibuan, 2019).

Metode Penelitian

Obyek dari penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengambil contoh kasus kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan merupakan data panel yaitu penggabungan antara data time series dan cross section, dengan data time series dari tahun 2017-2021 dan cross section 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode pengumpulan data adalah melalui metode studi pustaka.

Variabel dependen atau variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel PDRB Perkapita 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. PDRB Perkapita diketahui dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Seri 2010 Menurut Kabupaten/Kota, dengan satuan juta rupiah. PDRB Perkapita yang digunakan adalah PDRB Perkapita dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 (Mononimbar, 2017).

Sementara variabel independen pada penelitian ini antara lain Kesempatan Kerja, Investasi, Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pajak Daerah. Data variabel independen diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, realisasi APBD kabupaten/kota di Jawa Tengah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPB) Kementerian Keuangan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Dalam proses pengolahan penelitian ini, untuk menguji bagaimana pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai gambaran pencapaian SDGs ke-8, digunakan model analisis dengan alat analisis regresi data panel dengan formulasi sebagai berikut:

$$PDRBP_{it} = \beta_0 + \beta_1TKK_{it} + \beta_2PMDN_{it} + \beta_3POV_{it} + \beta_4IPM_{it} + \beta_5TAXX_{it} + \epsilon_{it}$$

Dimana:

PDRBP	= Produk Domestik Regional Bruto Perkapita
TKK	= Tingkat Kesempatan Kerja
PMDN	= Growth Penanaman Modal Dalam Negeri
POV	= Tingkat Kemiskinan
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
TAXX	= Realisasi Pajak Daerah
β_0	= Konstanta atau intersep
$\beta_1 \beta_2 \beta_3, \dots, \beta_5$	= Koefisien regresi variabel bebas
i	= menunjukkan data cross-section
t	= menunjukkan data time series
eit	= komponen error di waktu t

Hasil dan Pembahasan

Dalam rangka menjawab permasalahan yang diajukan, penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel. Analisis data panel memiliki 3 (tiga) teknik, yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model (Widarjono 2005). Hasil dari penelitian ini terpilih estimasi menggunakan model FEM. Langkah pertama yang dilakukan adalah menguji Chow Test untuk menentukan estimasi model yang terpilih apakah FEM ataupun CEM model. Kriteria pemilihan dan hasil dari chow test adalah sebagai berikut:

H0: $pvalue > \alpha$ Common Effect Model

H1: $pvalue < \alpha$ Fixed Effect Model.

Tabel 3 Hasil dari Chow Test

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-Section F	221.537171	(34,135)	0.0000*

Sumber: Eviews 9 (data diolah)

Catatan: * Significant 5%

Sesuai dengan kriteria pemilihan chow test, hasil pengujian menunjukkan probability $F < 0,05$ atau $0.0000 < \alpha$ ($\alpha = 0,05$). Kesimpulan dari hasil tersebut adalah terpilih model Fixed Effect Model (FEM). Setelah melakukan uji chow test, selanjutnya uji estimasi menggunakan Hausman Test. Hausman Test adalah uji yang dilakukan untuk membandingkan model FEM dan REM serta memilih model terbaik untuk pengujian menggunakan data panel (Widarjono 2005). Kriteria pemilihan dan hasil dari hausman test adalah sebagai berikut:

H0: $pvalue > \alpha$ Random Effect Model

H1: $pvalue < \alpha$ Fixed Effect Model

Tabel 4 Hasil dari Hausman Test

Test Summary	Chi.Sq.Stat	Chi.Sq.d.f	Prob.
Cross-Section Random	15.856004	5	0.0073*

Sumber: Eviews 9 (data diolah)

Catatan: * Significant 5%

Berdasarkan hasil pengujian Hausman Test (Tabel 4), ditemukan bahwa probability dari random cross-section $< 0,05$ atau $0.0073 < \alpha$ ($\alpha = 0,05$), sehingga model yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Oleh karena itu, variabel yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan hasil estimasi model FEM. Variabel-variabel yang akan dianalisis adalah tingkat kesempatan kerja (TKK), growth investasi

PMDN (PMDN), tingkat kemiskinan (POV), indeks pembangunan manusia (IPM), dan pajak daerah (TAXX).

Korelasi antar variabel dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Fixed Effect Model dengan metode generalized least square cross-section weights. Hubungan antar variabel dapat dilihat di tabel 5 berikut ini:

Tabel 5 Hasil Estimasi Penelitian

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-146.5957	18.05485	-8.119464	0.0000
TKK	21.29493	8.742938	2.435672	0.0162
PMDN	-0.006339	0.002044	-3.100838	0.0023
POV	-0.386708	0.095529	-4.048053	0.0001
IPM	2.389553	0.169432	14.10328	0.0000
TAXX	-0.017482	0.004140	-4.222194	0.0000
R-Squared	0.991728			
Adj R-squared	0.989338			
F-Stat	415.0061			
Prob-F	0.000000*			

Sumber: Eviews 9, data diolah

Catatan: * Significant 5%

Hasil pengolahan data pada aplikasi Eviews (Tabel) menggunakan metode FEM menunjukkan bahwa koefisien determinasi Adj R-squared adalah sebesar 0.989338. Hal ini mempunyai arti bahwa kemampuan variabel independen tingkat kesempatan kerja, growth investasi PMDN, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan pajak daerah dapat menjelaskan variasi dari variabel PDRB perkapita sebesar 98,9% dan sisanya sebesar 1,1 % dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selain itu, didapatkan nilai prob dari Fstat sebesar 0.000000 (< 0,05). Disimpulkan secara statistik, bahwa pada tingkat kepercayaan 95%, paling tidak terdapat satu variabel independen yang signifikan terhadap variabel PDRB perkapita. Hasil regresi dari model Fixed Effect dapat diformulasikan dalam persamaan sebagai berikut:

$$\text{PDRBPt} = -146.5957 + 21.29\text{TKK}_{it} - 0.0063\text{PMDN}_{it} - 0.38\text{POV}_{it} + 2.38\text{IPM}_{it} - 0.017\text{TAXX}_{it} + \text{eit}$$

Persamaan di atas menunjukkan nilai konstanta (c) sebesar -146,5957, nilai tersebut mempunyai arti bahwa PDRB memiliki nilai -146,5957 tanpa dipengaruhi variabel independen yang ada dalam model. Tingkat Kesempatan Kerja memiliki nilai prob 0,01 (<0,05) dan koefisien sebesar 21.29 terhadap PDRBP, artinya secara statistik TKK signifikan dan berpengaruh positif. Setiap kenaikan Tingkat Kesempatan Kerja sebesar satu persen, diasumsikan terjadi kenaikan PDRBP sebesar 21.29 %. Sedangkan tingkat kemiskinan memiliki nilai prob 0.0001 dan koefisien sebesar -0.386708. Tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan dan berpengaruh negatif terhadap PDRBP. Setiap penurunan POV sebesar 1%, diasumsikan terjadi kenaikan PDRBP sebesar 0.38%. Selanjutnya, indeks pembangunan manusia memiliki nilai prob 0.000 dan koefisien sebesar 2.38955 yang berarti IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRBP. Setiap kenaikan IPM sebesar satu persen, maka PDRBP diasumsikan akan terpengaruh dengan kenaikan sebesar 2.38%. Ketiga variabel independen tersebut sesuai dengan teori ekonomi dimana kesempatan kerja dan IPM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berbeda dengan variabel-variabel independent lainnya yaitu growth investasi PMDN dan pajak daerah. PMDN memiliki nilai prob 0.0023 dan koefisien sebesar -

0.0063, yang berarti berpengaruh signifikan namun mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sama halnya dengan PMDN, pajak daerah juga memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dimana dapat dilihat dari nilai prob-nya yang sebesar 0.0000 dengan koefisien -0.01748. Hal ini bertentangan dengan teori ekonomi dimana investasi dan pajak daerah seharusnya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kesempatan kerja terbukti berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa perluasan kesempatan kerja dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah daerah terkait perluasan kesempatan kerja serta terciptanya lapangan kerja dari dibukanya kran investasi di Jawa Tengah terbukti efektif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Investasi PMDN menghasilkan temuan berpengaruh signifikan terhadap PDRB namun pengaruhnya negatif. Investasi dalam negeri tidak terbukti secara teori ekonomi dimana seharusnya investasi menambah pertumbuhan ekonomi. Pengaruh negatif ini menunjukkan bahwa investasi dalam negeri di Jawa Tengah tidak tepat sasaran atau tidak dapat memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja, dunia usaha, pengurangan pengangguran, peningkatan konsumsi, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan PMDN, kemandirian daerah atau secara spesifik diukur dari kemandirian fiskal di Jawa Tengah kurang efektif dalam kontribusinya untuk pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan dengan pajak daerah yang berpengaruh signifikan namun berpengaruh negatif terhadap PDRB Perkapita (Paramita & Purbadharmaja, 2015).

Temuan untuk variabel tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia menunjukkan bahwa peningkatan kualitas masyarakat di Jawa Tengah berpengaruh dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari hasil analisis untuk kedua variabel tersebut yang sudah sesuai dengan teori perekonomian yakni berpengaruh negatif untuk tingkat kemiskinan dan berpengaruh positif untuk indeks pembangunan manusia. Penting untuk pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan untuk menetapkan target utama kebijakannya lebih kepada pengentasan kemiskinan, pengendalian stunting, peningkatan lama sekolah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Astuti, Hidayat, & Darwin, 2017).

Kesimpulan

Kesempatan kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia terbukti berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat kemiskinan terbukti berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk Investasi PMDN dan pajak daerah tidak terbukti berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Temuan yang menunjukkan investasi di dalam negeri berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi membuktikan bahwa investasi di dalam negeri belum tepat sasaran dan tidak memberikan dampak positif pada kesempatan kerja, konsumsi, pertumbuhan ekonomi, dan variabel lainnya. Untuk itu, pemerintah perlu membuat aturan agar investasi di Jawa Tengah dapat lebih merata untuk dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya kalangan tertentu saja. Pemerataan ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan, konsumsi, serta pertumbuhan ekonomi secara agregat.

Pajak daerah yang menunjukkan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi membuktikan bahwa kemandirian fiskal belum terbukti berkontribusi positif terhadap perekonomian. Kegiatan-kegiatan maupun program pemerintah daerah yang selama ini

dibiayai oleh pajak perlu dievaluasi. Selain itu, penggunaan pajak daerah untuk pembiayaan juga dirasa belum maksimal. Untuk hal itu, pemerintah daerah perlu mengurangi ketergantungan dari pemodal dari luar maupun dari pemerintah pusat untuk pembiayaan kegiatan dan lebih bisa memaksimalkan dan mengefektifkan penggunaan pajak daerah. Kebijakan yang telah dievaluasi sekaligus anggaran yang disesuaikan dapat menjadi dasar untuk menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya agar lebih tepat sasaran, merata ke seluruh lapisan masyarakat, dan efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

BIBLIOGRAFI

- Astuti, Windy Ayu, Hidayat, Muhammad, & Darwin, Ranti. (2017). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 7(2), 140–147.
- Danawati, Sri, Bendesa, I. K. G., & Utama, Made Suyana. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Kesempatan kerja, Pertumbuhan ekonomi serta ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di provinsi bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(7), 2123–2160.
- Dewi, Nyoman Lilya Santika, & Sutrisna, I. Ketut. (2014). Pengaruh komponen indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3(3), 44443.
- Ginting, Andi Lopa, & Hasibuan, Sondang Naully. (2019). Interelasi Pengeluaran Pemerintah dan Kesempatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 6(2), 230–244.
- Mirza, Denni Sulistio. (2012). Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1(2).
- Mononimbar, Reggie W. (2017). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah sebagai variabel intervening di kabupaten minahasa selatan (2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(02).
- Paramita, A. A. Istri Diah, & Purbadharmaja, I. B. Putu. (2015). Pengaruh investasi dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(10), 44574.
- Rahmadi, Selamat, & Parmadi, Parmadi. (2019). Pengaruh ketimpangan pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi antar pulau di Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(2), 55–66.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.